

Penanganan masalah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tampaknya masih 'jauh panggang dari api'. Keracunan siswa usai menyantap jatah MBG menjadi sorotan utama. Kejadian yang membahayakan kesehatan ini ternyata masih berlanjut. Terbaru, 174 siswa jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan mengalami gejala mual, muntah, dan pusing. Bahkan, 8 diantaranya masih menjalani perawatan di RSUD Talang Ubi PALI pada Selasa (6/5/2025). Ini menambah panjang daftar keracunan yang dialami usai menyantap menu MBG. Menurut catatan, sebelumnya ada sekitar 742 siswa dari Tasikmalaya, Cianjur, Bandung, hingga Karanganyar yang mengalami gejala serupa. Angka ini lebih besar dari klaim Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan kasus siswa keracunan hanya di bawah 200 orang atau 0,05% dari total penerima program. Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, mengungkapkan lembaganya masih membutuhkan anggaran hingga Rp116 triliun pada Desember 2025. Dana sebesar itu untuk mewujudkan permintaan Prabowo terkait percepatan pelayanan MBG kepada 82,9 juta orang. Bahkan tahun depan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebut pagu indikatif MBG bakal meningkat menjadi Rp268 triliun pada 2026. Sayangnya, menurut ekonom duit ratusan triliun MBG itu tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian tanah air, hanya 0,06%. Secara garis besar, sektor penyediaan makan dan minum, malah tumbuh melambat pada kuartal I-2025, dengan pertumbuhan sebesar 7,12 %. Bandingkan dengan kuartal I-2024, tanpa ada MBG pertumbuhan sektor teraebut mampu tumbuh sebesar 9,57 %. Apa yang keliru?

Baca Hal 11...

EDISI RABU, 07 MEI 2025

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

02
05
10

GOVERNMENTTODAY
Prabowo: TNI Selalu Dituduh Ingin
Menjadi Diktator

HAJI 2025
Rencana Kambing Dam Jamaah Haji
Disembelih di RI, Menag: Tunggu Fatwa MUI

LISTSTYLE
Rambut Lepek? Ini Penyebabnya dan
Cara Mengatasinya!

KERACUNAN BERLANJUT, MBG MALAH DIKEBUT

Anggaran Naik 57% Jadi Rp 268 T di 2026

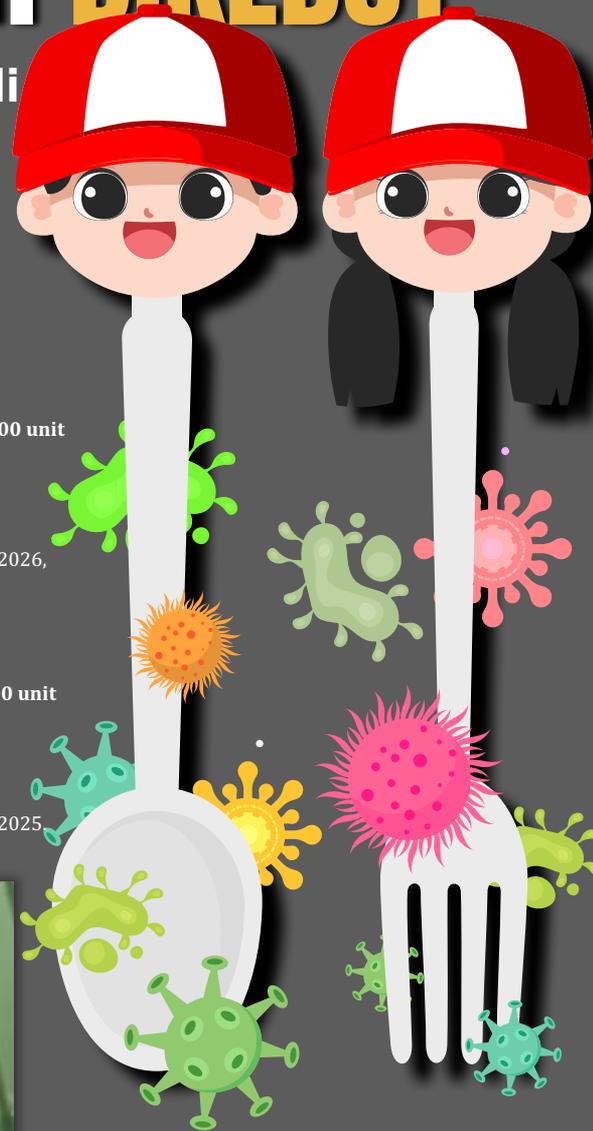
Diguyur Anggaran

Tahun 2026

- Pagu Indikatif Rp268 triliun (naik 57%)
- Target jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 32.000 unit
- Target penerima 82,9 juta orang
- Memberikan kontribusi 1,03% terhadap PDB pada 2026
- Tenaga kerja yang terlibat 1,32 juta orang
- Target penurunan kemiskinan 0,38 poin persentase pada 2026,

Tahun 2025

- Pagu Indikatif Rp171 triliun
- Pada bulan Oktober 2025, target SPPG adalah sebanyak 22.000 unit
- Target penerima 66 juta penerima manfaat.
- Memberikan kontribusi 0,82% terhadap PDB pada 2025
- Tenaga kerja yang terlibat 1,03 juta orang
- Target penurunan kemiskinan 0,27 poin persentase pada 2025.



Deretan Peristiwa Keracunan Diduga Karena Mbg

- PALI, Sumsel (5/5/2025) - 174 siswa keracunan usai makan MBG antara pukul 11.00-12.00 WIB.
- Cianjur, Jabar (21/4/2025) - 78 siswa MAN 1 dan SMP PGRI Cianjur alami gejala keracunan setelah makan MBG.
- Sukoharjo, Jateng (16/1/2025) - 40 siswa SD mual dan muntah usai makan MBG; ayam goreng diduga kurang matang.
- Semarang, Jateng (4/2/2025) - Siswa SMA muntah dan demam usai konsumsi "mendoan basi" dari kotak MBG.
- Empat Lawang, Sumsel (18/2/2025) - 8 murid SD keracunan, makanan MBG diduga basi dan berulat.
- Sumba Timur, NTT (18/2/2025) - 15 siswa SD di Waingapu alami keracunan usai makan nasi, mi goreng, dan lauk MBG.
- Pandeglang, Banten (19/2/2025) - 28 siswa SDN Alaswangi 2 diduga keracunan MBG, dilaporkan oleh orang tua murid.



LAKA BUS DI PADANG PANJANG RENGGUT 12 JIWA

Sebanyak 12 orang meninggal dan 23 orang mengalami luka-luka akibat kecelakaan maut bus ALS yang terjadi di Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa (6/5/2025). Penumpang banyak meninggal karena terjepit badan bus. Sementara korban luka terdiri dari 17 pria dan enam perempuan. Diduga kecelakaan karena rem blong. (ist.antara)



Presiden Prabowo Subianto duduk satu meja dengan mantan wakil presiden, Try Sutrisno dan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam kegiatan halalbihalal Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025). (Setpres)

Presiden Prabowo Subianto mengatakan, TNI selalu dituduh menjadi diktator. Padahal, Prabowo mengklaim TNI merupakan sosok yang menyukseskan reformasi.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung berbagai jasa dan sikap TNI selama Indonesia merdeka. Bahkan, dalam reformasi, TNI-Polri yang memegang peran hingga reformasi bisa terwujud.

"TNI selalu dituduh bahwa kita mau jadi diktator," kata Kepala Negara dalam kegiatan halalbihalal Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Mantan komandan jenderal Kopassus ini mulanya tidak terima TNI dituduh menjadi diktator ketika memimpin sebuah negara. Menurut Menteri Pertahanan ini, dalam sejarah dunia, tidak ada tentara yang mundur dari politik. Namun, TNI justru mundur dari gerakan reformasi. "Kami rela mundur," kata dia.

"Reformasi itu, yang sukseskan reformasi itu, adalah tokoh-tokoh TNI-Polri, ABRI. Kita harus mengatakan apa yang benar," tambahnya.

Prabowo meminta, masyarakat melihat kondisi ini lebih objektif. Misalnya saja, tingkat kepercayaan warga terhadap TNI lewat berbagai hasil survei.

"Dan maaf, sekarang kalau di survei rakyat Indonesia, mana institusi yang paling Anda percaya, tanya rakyat, yang teratas adalah TNI, tentara. Silakan. Bukan kita yang bikin survei. Ini survei internasional," ucap dia.

Adapun Gerakan Reformasi 1998, sering disebut sebagai Gerakan

Mahasiswa 1998, adalah puncak dari berbagai gerakan mahasiswa dan masyarakat yang menuntut perubahan di Indonesia pada akhir dekade 1990-an. Gerakan ini berhasil memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada 21 Mei 1998, setelah menjabat selama 32 tahun.

Presiden RI Prabowo Subianto sempat memberikan hormat kepada Wapres ke-6 RI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno di acara halalbihalal bersama purnawirawan TNI dan Polri. Prabowo memberi hormat kepada Try Sutrisno sesaat sebelum menyampaikan sambutan.

Diketahui, perwakilan Persatuan

Prabowo: TNI Selalu Dituduh Ingin Menjadi Diktator

Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) sempat menemui Prabowo pada 30 April lalu. Perwakilan PPAD mendatangi Prabowo di Istana Merdeka.

Pertemuan itu di tengah wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digulirkan oleh kelompok purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI.

Banyak Purnawirawan Buat Partai

Presiden Prabowo juga mengungkapkan alasan purnawirawan TNI banyak yang terjun ke dunia politik. Menurutnya mantan prajurit memiliki jiwa patriotik dan rasa ingin berbakti.

"Jadi begitu keluar dari tentara rasa cinta tanah air, tanggung jawab, rasa ingin berbakti, rasa ingin menyelamatkan bangsa dan negara masih kuat," kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu Prabowo

juga menyebut banyaknya senior di TNI yang membangun partai politik, termasuk dirinya.

"Karena itu senior TNI ada yang terjun ke politik, pak Edi Sudrajat, pak Try (Try Sutrisno), pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), Pak Wiranto bikin partai, saya bikin partai. Kenapa? karena kita ingin berbakti," kata Prabowo.

"Karena kita pada ujungnya kita mengakui kedaulatan rakyat, kita tunduk pada kedaulatan rakyat, dengan itu kita mau berkuasa dengan meminta mandat dari rakyat," imbuhnya.

Menurut Prabowo TNI tidak mau berkuasa menggunakan senjata, tapi melalui mandat dari rakyat. "Pak Harto (Soeharto) tidak mau berkuasa dengan senjata, beliau tampil karena ada vakim, karena ada krisis. Janganlah kita mau kutak katik kebenaran," tutur Prabowo. (din,rls,tmo,ant/dya)

Beberkan Sekolah Rakyat: Bapaknya Susah, Anaknya Jangan

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam membangun masa depan bangsa melalui pendidikan. Ia membeberkan program unggulan yang menasar keluarga miskin demi memutus rantai kemiskinan

Prabowo menyebut, dalam waktu dekat pemerintahannya akan membangun 100 sekolah berasrama. Sekolah yang dimaksud adalah Sekolah Rakyat yang dimotori Kemensos dan Kemendikdasmen.

"Saudara-saudara, salah satu program kita nanti adalah saya akan membangun minimal 100 sekolah berasrama. Sekolah berasrama ini biasanya di setiap negara itu sekolah berasrama itu untuk yang terpintar, itu tetap kita lakukan," kata Prabowo.

"Tapi saya akan bangun minimal 100 tiap tahun sekolah berasrama untuk keluarga yang paling tidak mampu," tambah dia.

Prabowo menekankan, pendidikan adalah kunci perubahan

sosial. Anak-anak dari keluarga miskin harus memiliki kesempatan untuk hidup lebih baik dari orang tuanya. Prabowo menyebut, cita-cita hanya bisa terwujud jika ada keberanian dalam mengambil langkah.

"Untuk itu tidak ada jalan lain siapa berani menang, berani benar berhasil, berani dulu, baru benar, setelah berani benar baru berhasil. Harus berani dulu, kalau nggak berani kita enggak bisa dapat apa-apa," kata Prabowo.

"Karena saya bertekad untuk memutus rantai kemiskinan, kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung, bapaknya tukang becak, bapaknya susah, anaknya tidak boleh," jelas Prabowo.

Prabowo mengatakan, pembangunan sekolah berasrama ini akan dimulai pada Juli dengan target



Presiden Prabowo Subianto menampilkan salah satu calon siswa Sekolah Rakyat di Halalbihalal Purnawirawan TNIAD, Selasa (6/5/2025). (ist)

awal sekitar 53 hingga 55 sekolah rakyat.

Program ini bukan hanya fisik bangunan, melainkan juga seleksi ketat terhadap calon peserta didik yang benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu.

"Nah sekarang sudah mulai seleksi murid, syaratnya harus benar-benar dari keluarga tidak mampu dan salah satu teknik mereka, Kemensos, PANRB, dan BPS karena mereka yang punya data, adalah mengecek rumah tinggal keluarga tersebut," tandas dia. (wid,rls,ant/dya)

Komisi X Minta PAUD Gratis jika Masuk Wajib Belajar 13 Tahun

Kemendikdasmen mengusulkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masuk dalam wajib belajar 13 tahun dan diatur dalam RUU Sisdiknas.



(Ilustrasi) PAUD diusulkan masuk dalam skema wajib belajar 13 tahun dalam revisi UU Sisdiknas. (Ant)

Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menyatakan, pendidikan anak usia dini (PAUD) harus digratiskan bila masuk dalam wajib belajar 13 tahun sebagaimana diusulkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Esti menyatakan, negara harus hadir untuk memenuhi kebutuhan operasional PAUD jika ingin menjadikannya bagian dari program wajib belajar 13 tahun lewat revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

"Kalau sekolah di PAUD untuk prasekolah usia 5-6 tahun itu juga menjadi sebuah kewajiban bagi kita, maka harus untuk kemudian diberikan secara gratis, baik negeri maupun swasta," kata Esti dalam rapat dengan Kemendikdasmen, Selasa (6/5/2025).

Esti menegaskan bahwa bantuan dari negara bagi guru PAUD dan masyarakat yang kesulitan mengakses layanan pendidikan prasekolah sangat diperlukan.

Sebab, dia mengaku kerap menerima keluhan dari masyarakat yang kesulitan memenuhi biaya PAUD hingga persoalan kesejahteraan guru karena rendahnya upah.

"Anak-anak mau PAUD saja kan seragam. Seragam saja sudah bikin pusing. Wah, chat WhatsApp-nya banyak. Pada nanya, Bu, ada nggak bantuan untuk PAUD? Belum gurunya. Bu, gimana kesejahteraan guru PAUD?" kata Esti.

Politikus PDI-P ini pun menyarankan agar Kemendikdasmen mengajukan anggaran khusus untuk mendukung operasional dan pelayanan PAUD. Esti juga mendorong pemerintah menyediakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk PAUD serta tunjangan bagi gurunya meskipun jam mengajar mereka lebih sedikit dibandingkan jenjang lain.

"Misalnya, per PAUD 2 orang yang kemudian harus menjadi tanggungan negara. Atau kalau perlu ada BOS untuk PAUD, seberapa besar pun itu.

Karena memang lebih kecil jam mengajarnya. Tapi perlu dihitung dengan berbagai alternatif," ujar Esti.

Kemendikdasmen juga diminta untuk menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk membantu masyarakat mengakses layanan PAUD serta menjamin kesejahteraan para guru.

"Jadi sebaran PAUD-nya, lalu jumlah muridnya, lalu untuk memberikan reward kepada guru-guru PAUD-nya, itu perlu dihitung.

Mengapa saya sampaikan ini? Menteri Keuangan mengatakan tidak mungkin kami memberikan kalau tidak ada pengajuan. Nah, ini forum yang kemudian kita akan memberikan usulan konkret," kata Esti.

Sorot Kesiapan Orang Tua

DPR juga mempertanyakan kemampuan Indonesia untuk menerapkan program wajib belajar 13 tahun. Hal itu diungkapkan oleh Ketua

Komisi X DPR Hetifah Sjaifudiani dalam rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tersebut.

"Jika PAUD dimasukkan menjadi bagian dari wajib belajar, kira-kira kita siap tidak," kata Hetifah dalam rapat yang disiarkan secara daring itu.

Hetifah menanyakan kesiapan itu mulai dari kemampuan finansial orangtua termasuk dari kalangan keluarga tidak mampu. Selain itu, ia juga ingin melihat kemampuan dari pemerintah baik pusat dan daerah terkait skema pendukung dan pendanaannya. "Dan juga mungkin hal-hal lain yang bisa ingatkan oleh Pak Gogot," ujarnya.

Menurut Hetifah mendengarkan pendapat seperti ini sangat penting karena menambahkan satu kalimat dalam Undang-Undang akan memiliki konsekuensi. "Mungkin itu yang ingin kami dengar secara konkret. Apa adanya saja," ucap Hetifah. (wid,rls,kcm/dya)

Tiga Isu Penting RUU Sisdiknas

DIREKTUR Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, mengusulkan agar PAUD masuk dalam skema wajib belajar 13 tahun dalam revisi UU Sisdiknas.

"Secara khusus rekomendasi kami terkait dengan RUU Sisdiknas tentang PAUD. Jadi, PAUD perlu menjadi jenjang tersendiri," ujar Gogot di Gedung DPR RI, Selasa (6/5/2025).

"Aspirasi tata kelola kelembagaan ini diharapkan dapat mendukung penerapan wajib belajar 13 tahun, satu tahun prasekolah melalui optimalisasi peran PAUD," imbuh dia.

Menurut Gogot, penyesuaian regulasi yang memungkinkan wajib belajar 1 tahun prasekolah perlu menjadi bagian dalam pembahasan RUU Sisdiknas. Sebab, ketentuan soal wajib belajar 1 tahun prasekolah belum diatur dalam UU Sisdiknas 2003, meskipun telah masuk dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (Bappenas), Amich Alhumami mengatakan ada tiga isu krusial yang perlu ada dalam RUU Sisdiknas.

"Kami memastikan kalau kebijakan publik itu benar dan memberikan pelurusan atas rancangan kebijakan, maka ini beberapa hal yang ingin kami bedah," kata Amich katanya dalam Seminar Nasional Pendidikan: RUU Sisdiknas dan Komitmen Negara dalam Pemenuhan Hak Pendidikan untuk Semua via Zoom, beberapa waktu lalu.

Amich mengatakan bahwa revisi UU Sisdiknas perlu mengubah poin Wajib Belajar 9 Tahun menjadi Wajib Belajar 13 Tahun. Jika demikian, maka perlu ditambahkan juga pengaturan soal PAUD.

Utamanya pengakuan PAUD sebagai jenjang pendidikan formal dan penyetaraan status seluruh guru PAUD. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan komitmen dukungan pemerintah khususnya terkait anggaran kepada PAUD.

Sampai saat ini ada sebanyak 29.830 PAUD di wilayah Indonesia. Sementara 23 ribu lebih desa tercatat belum mempunyai PAUD.

"Konsekuensi dari kebijakan Wajib 13 tahun yaitu perluasan akses layanan PAUD. Mengingat partisipasi PAUD yang masih rendah, maka akan ada kebutuhan anggaran yang cukup besar dalam beberapa hal," ujarnya.

Anggaran tersebut menyasar sarana dan prasarana guru dan tenaga kependidikan, bantuan operasional satuan PAUD, dan bantuan untuk peserta didik.

Selanjutnya, Amich mengatakan UU guru dan dosen perlu digabungkan dengan UU Sisdiknas sehingga kebijakan pendidikan dapat memiliki dasar yang lebih kokoh dan komprehensif.

Revisi UU Sisdiknas maupun UU Pemdanya menurutnya perlu mempertimbangkan restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru agar pengelolaan guru dapat lebih terpadu. Selain itu juga menjamin kesejahteraan, akses pengembangan karier dan kompetensi.

Adapun total kebutuhan guru di sekolah negeri atau guru Aparatur Negeri Sipil (ASN) saat ini sebanyak 2,1 juta orang. Namun, kebutuhan ini sudah terpenuhi secara bertahap. (wid,rls,ant/dya)

Episode Baru Korupsi Gula Tom Lembong Seret Moeldoko, Gita Wirjawan hingga Polri

Sidang dugaan korupsi importasi gula yang menjerat Tom Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025) memasuki episode baru. Jenderal (Purn) Moeldoko dan mantan Mendag Gita Wirjawa diharapkan bisa dihadirkan di sidang. Fakta baru, Tom menerbitkan izin impor gula sebanyak 200.000 ton untuk Induk Koperasi Polri (Inkoppol) dari 300.000 ton kuota yang diajukan.



ujar Waluyo membaca surat tersebut.

Menurut dia, surat itu ditembuskan kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Menteri Perindustrian, Kapolri, Kepala Staf Kepresidenan, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). "Setelah surat ini terbit, Pak, Ketua Inkoppol waktu itu juga lapor pada Pak Kapolri terkait operasi pasar gula yang dilaksanakan Inkoppol," tutur Waluyo.

Dalam perkara ini, Tom didakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perbuatannya dinilai melanggar hukum, memperkaya orang lain maupun korporasi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 578 miliar.

Jaksa dalam surat dakwaannya mempersoalkan tindakan Tom Lembong yang menunjuk sejumlah koperasi TNI-Polri untuk mengendalikan harga gula, alih-alih perusahaan BUMN.

"Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak menunjuk Perusahaan BUMN untuk pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula, melainkan Inkopkar, Inkoppol, Puskopol, SKKP TNI-Polri," kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

Ada Mou Kemendag-TNI AD

Kubu mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong meminta majelis hakim dapat

menghadirkan Jenderal (Purn) Moeldoko dan mantan Mendag Gita Wirjawan di ruang sidang.

Hal itu sebagaimana disampaikan tim hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa (6/5/2025).

Menurutnya, dengan menghadirkan keduanya di persidangan dapat menjawab secara jelas perihal panjangnya rantai distribusi gula yang sempat ditanyakan majelis hakim di ruang sidang.

"Tadi menarik apa yang disampaikan oleh hakim anggota tentang kenapa distribusinya berbelit-belit dan segala macamnya, untuk itu yang kami hormati majelis hakim, ada baiknya kalau untuk meninjau pertanyaan tersebut, kita undang Pak Moeldoko dan Pak Menteri Perdagangan pada waktu itu, jadi kita usul. Terima kasih," kata Ari.

Ditemui pada sela-sela rehat sidang, Ari menjelaskan, kehadiran keduanya diharapkan mampu menjelaskan apa yang ditanyakan Hakim Anggota, Alfis Setyawan perihal panjangnya rantai distribusi.

"Tadi anggota majelis hakim memperdalam kenapa kok dari pihak Induk Koperasi Angkatan Darat dan Induk Koperasi Polisi meminta penunjukan, padahal mereka tidak memiliki modal yang cukup, padahal menjadi panjang rantai distribusinya, tadi kan pertanyaan hakim seperti itu," ujar Ari. (din,ist,kcm/dya)

Menteri Perdagangan (Mendag) tahun 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menerbitkan izin impor gula sebanyak 200.000 ton untuk Induk Koperasi Polri (Inkoppol) dari 300.000 ton kuota yang diajukan.

Informasi ini disampaikan Kepala Divisi Perdagangan Inkoppol, Muji Waluyo, saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi importasi gula yang menjerat Tom Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Pada persidangan tersebut, Waluyo membacakan surat permohonan yang diajukan Inkoppol kepada Tom Lembong selaku Mendag. "Inkoppol bersurat yang intinya mohon dapat kiranya Bapak Menteri memberikan tugas pada Inkoppol memberikan izin serta penugasan untuk melakukan operasi pasar melalui pendistribusian gula sebanyak 300.000 ton sampai dengan akhir bulan Desember 2016," ujarnya.

Selain itu, Inkoppol juga meminta Tom Lembong menerbitkan izin impor 300.000 ton raw sugar kepada produsen gula nasional yang menjadi mitra koperasi Korps Bhayangkara tersebut.

Jaksa lantas mengonfirmasi bahwa permohonan dari Inkoppol ditindaklanjuti Tom Lembong dengan menerbitkan Surat Nomor 634 tanggal 3 Mei 2016 yang dibenarkan oleh Waluyo.

Pensiunan jenderal polisi bintang tiga itu mengatakan, dalam surat itu, Tom Lembong mengabulkan sebagian permohonan Inkoppol. "Pada prinsipnya kami juga dapat menyetujui permohonan saudara, untuk pengadaan gula mentah guna kebutuhan pendistribusian gula tersebut di atas sebesar 200.000 ton,"

Saksi Sebut Tomy Winata Pemilik Perusahaan Impor Gula

SALAH satu perusahaan yang mendapatkan izin impor gula dari Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong adalah PT Angels Product. Salah satu saksi dalam lanjutan sidang yang menjerat Tom Lembong menyebut bahwa perusahaan itu dimiliki pengusaha ternama Tomy Winata.

Awalnya dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (6/5/2025), jaksa menghadirkan Letkol Chk HIS Sipayung sebagai mantan Kepala Bagian Hukum dan Pengamanan Induk Koperasi Kartika (Kabag Kumpam Inkopkar). Dalam perkara dugaan korupsi terkait izin impor gula ini, Inkopkar menjadi salah satu distributor gula dari PT Angels Product.

Dalam kesaksiannya, Sipayung mengaku bergabung dengan Inkopkar sejak 2014. Tom Lembong, yang mendapatkan giliran mengajukan pertanyaan, kemudian menanyakan hubungan Inkopkar dengan PT Angels Product kepada Sipayung.

"Pada saat itu, PT Angels Product sudah ada nggak? Sudah bekerja sama dengan Inkopkar pada saat itu?" tanya Tom Lembong kepada Sipayung, yang duduk di kursi saksi dalam persidangan.

"Bukan. Jadi kita kerja sama dengan Angels (PT Angels Product) itu 2015. Nah, itu bukan kita nyari-nyari. Jadi yang saya tahu Angels itu sudah ada di situ, lalu saya bikin kerja sama atas perintah Ketua," jawab Sipayung.

"Bisa dijelaskan sedikit, Pak, maksud Bapak dengan sudah ada di sana? Sudah punya hubungan atau kerja sama dengan TNI AD atau Inkopkar atau?" tanya Tom lagi.

"Kalau Angels itu yang saya tangkap punya Tomy Winata, Pak. Nah, kita punya hubungan dengan Tomy Winata masalah Hotel Kartika Discovery (Discovery Kartika Plaza Hotel) itu punya Inkopkar yang ngelola itu anak perusahaannya Tomy Winata, PTK, Pak. Yang saya bilang Angels sudah ada di situ ketika saya dipanggil oleh Ketua di ruangan beliau, itu direktur Angels ada di situ, orang-orang Angels sudah ada di situ, dikasih penjelasan bla bla bla, buat ini, udah, coba bikin perjanjian, nah seperti itu, Pak," jawab Sipayung. (wid,rls,ant/dya)

Rencana Kambing Dam Jamaah Haji Disembelih di RI, Menag: Tunggu Fatwa MUI

Menteri Agama (Menag), Nasruddin Umar masih memperjuangkan agar penyembelihan kambing dam jamaah haji Indonesia bisa dilakukan di dalam negeri. Pihaknya masih menunggu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).



Penyembelihan kambing dam di RPH Al-Okaishiah. Foto: MCH 2023

Pihak Saudi juga menyambut baik, karena mereka tak perlu repot mengolah daging kambing itu ke dalam kaleng dan menyebarkannya ke seluruh dunia.

"Saat ini baru petugas haji saja, ada 4 ribu petugas yang kambing dam-nya dipotong di Indonesia," tutur dia.

Nasruddin menyampaikan,

beberapa negara sudah menyembelih kambing dam di negara mereka sendiri, seperti Turki.

Dikatakan, PBNU dan Muhammadiyah sudah memberikan dukungan soal rencana pemotongan kambing dam ini. Kini tinggal menunggu fatwa MUI soal pemotongan kambing dam ini. (wid,rls,ant/dya)

Kambing dam adalah kambing yang disembelih sebagai bentuk denda atau fidyah atas pelanggaran atau kesalahan dalam ibadah haji atau umrah.

Dalam kasus haji, dam wajib dibayar karena jamaah haji Indonesia melaksanakan haji tamattu. Artinya, jamaah RI umrah terlebih dulu sebelum berhaji.

"Ya kita lagi perjuangkan dengan fatwa majelis ulamanya, belum, baru kita negosiasi," kata Nasruddin kepada wartawan di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Ia mengatakan, MUI masih belum melakukan rapat untuk memutuskan fatwa halal atau tidaknya dam jamaah haji Indonesia dilakukan di Tanah Air. Selama ini, kambing dam disembelih di Arab Saudi.

Bila rencana Menag Nasruddin Umar terwujud, ada sekitar 221 ribu kambing dam dari jamaah haji Indonesia yang akan dipotong di tanah air. Kambing itu nanti akan disalurkan kepada yang berhak via Baznas.

"Kita perjuangkan (dam) di sini, ya berarti kambingnya dari Indonesia, yang makan dagingnya orang Indonesia, 230 ribu loh, bukan jumlah sedikit itu," ujarnya.

Diketahui, jamaah haji yang melaksanakan haji tamattu wajib membayar dam berupa menyembelih seekor kambing (hadyu). Jika tidak mampu, dam dapat diganti dengan puasa sepuluh hari, yaitu tiga hari saat di Tanah Haram dan tujuh hari setelah kembali ke kampung halaman.

Sebelumnya, Nasruddin mengungkapkan, pihaknya akan segera bersurat ke MUI untuk meminta fatwa tersebut.

"Pekan ini saya akan bersurat ke MUI untuk sidang secepatnya. Karena yang penting ada fatwanya," jelas dia.

Nasruddin mengungkapkan sejumlah alasan mengapa kambing dam ini lebih baik dipotong di Indonesia. Ratusan ribu kambing ini akan berguna bila disalurkan di Indonesia.

30 WNI Calon Haji Ilegal Masuk Arab Saudi

KONSULAT Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah menemukan 30 calon jamaah haji ilegal tiba di Arab Saudi. Mereka mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah.

"Tim Pelindungan Jamaah (Linjam) KJRI Jeddah mendapati 30 orang WNI yang tiba di Jeddah. Dari penampilan disinyalir mereka adalah calon Jsmaah Haji," ujar Konjen RI Jeddah, Yusron B. Ambary, Selasa (6/5/2025).

Saat diajak bicara oleh Tim Linjam, salah satu dari mereka mengatakan berasal dari Madura, Jawa Timur. Mereka pun sadar dengan adanya larangan berhaji menggunakan visa ziarah.

"Mereka menjawab 'Kalau bisa masuk alhamdulillah kalau tidak ya pulang ke Indonesia'," jelas Yusron.

Mereka tiba di Arab Saudi pada Sabtu (3/5/2025). Ketika ditanya lebih lanjut, mereka memilih bungkam dan tidak memberikan informasi lebih lanjut.

"Tidak mau menyampaikan data pihak yang mengatur keberangkatan mereka," papar Yusron.

Tim Linjam akhirnya kembali menyampaikan imbauan kepada

para calon jamaah haji ilegal itu. Mereka diminta untuk berpikir ulang dan tidak meneruskan niat mereka utk berhaji.

Seperti diketahui, Arab Saudi menerapkan sanksi tegas kepada calon jamaah haji ilegal. Bagi mereka yang nekat datang ke Tanah Suci menggunakan visa nonhaji, bisa dipenjarakan hingga denda 20.000 riyal Arab Saudi (Rp 89,5 juta).

Sedangkan bagi pihak travel yang memberangkatkan bisa dikenai denda 100.000 riyal Arab Saudi (Rp 438 juta).

Tak hanya itu, para calon jamaah haji ilegal juga bisa dideportasi dan dilarang masuk kerajaan selama 10 tahun.

Terpisah, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf ingatkan travel atau biro perjalanan yang nekat memberangkatkan jamaah tanpa visa haji resmi dapat terkena sanksi berupa pencabutan izin operasional.

"Kalau travel, ada aturannya, bisa melalui peringatan sampai pencabutan izin," ujar Kepala BP Haji Irfan Yusuf di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

SANKSI MELANGGAR ATURAN HAJI 2025

Denda SAR 20.000 atau

Rp 88,5 juta*

- Mencoba/nekat haji tanpa izin resmi/visa haji
- Pemegang semua jenis visa kunjungan yang mencoba masuk/tinggal di Makkah dan tempat suci selama musim haji

Denda SAR 100.000 atau

Rp 442,9 juta*

- Fasilitator haji tanpa izin resmi/visa haji
- Memfasilitasi masuk atau tinggal secara ilegal di Makkah
- Memberi akomodasi pemegang visa kunjungan
- Denda akan bertambah sesuai jumlah individu yang terlibat Deportasi dan Banned 10 Tahun

Kendaraan Disita

- Pengadilan terkait akan menyita kendaraan darat yang mengangkut pemegang visa kunjungan ke Makkah dan tempat-tempat suci
- Kendaraan yang dimaksud milik pengangkut, fasilitator, atau pihak terkait

Deportasi dan Banned 10 Tahun

- Penduduk atau orang yang melewati batas masa tinggal yang menyusup ke Makkah untuk haji tanpa izin

Sanksi berlaku mulai 29 April-10 Juni 2025

*kurs SAR 1 = Rp 4.429

Irfan beranggapan mereka yang hendak berangkat adalah korban yang teriming-iming modus berangkat haji tanpa antre. Para korban dijanjikan bisa ke Tanah Suci tanpa mengetahui soal aturan ketat yang diterapkan otoritas Arab Saudi.

"Tolonglah kasihan mereka ini. Mereka niat baik untuk menjalankan ibadah, tapi jangan dibuat ajang untuk mencari keuntungan yang seperti itu," kata dia.

Agar kejadian tidak terus terulang, BP Haji bersama Kementerian Agama (Kemenag) terus mengencakan edukasi kepada masyarakat serta memperkuat koordinasi dengan Keimigrasian. (wid,ant/dya)

Pendaftar Sekolah Rakyat Membludak, Pemkot Malang Kebut Perbaiki Gedung Poltekcom

MALANG - Minat masyarakat di Kota Malang terhadap program nasional, Sekolah Rakyat, membludak. Meskipun belum resmi dibuka, jumlah pendaftar lebih dari dua kali lipat jumlah kuota.

Di sisi lain, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tengah menggenjot perbaikan fasilitas di gedung Politeknik Kota Malang (Poltekcom). Agar bisa difungsikan sebagai sekolah berasrama, sesuai standar yang ditetapkan pemerintah pusat.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, Donny Sandito, mengatakan hingga awal Mei 2025, jumlah pendaftar telah mencapai 210 anak.

"Padahal kan kuota awal hanya dirancang untuk 4 rombongan belajar (rombel) atau sekitar 100 hingga 120 siswa. Jadi kami menilai antusiasme masyarakat ini luar biasa. Ini (pendaftar) kan berarti sudah dua kali lipat dari kapasitas yang diarahkan Kemensos," ujar Donny, Selasa (6/5/2025).

Melonjaknya jumlah pendaftar membuat Pemkot Malang mempertimbangkan pengajuan penambahan rombel ke Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, Donny menegaskan, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.

"Ya, bisa saja (mengajukan penambahan rombel). Tetapi kan nanti tetap menunggu keputusan pusat," imbuh Donny.

Donny juga menjelaskan, calon siswa yang diterima diprioritaskan dari kalangan keluarga miskin dan miskin ekstrem. Yang telah terdata dalam desil 1 dan 2 di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kemensos.

Untuk memastikan kesiapan siswa, menurutnya para pendaftar akan mengikuti sejumlah tahapan seleksi, mulai dari tes kesehatan, psikologi, hingga pengetahuan dasar. "Tes itu bukan untuk menyaring siapa yang lolos atau tidak, tetapi lebih ke pemetaan kemampuan siswa, agar bisa diketahui kebutuhan pendampingan belajarnya," jelasnya.

Sementara itu, guna menyambut tahun ajaran baru yang dimulai Juni 2025 nanti, Pemkot Malang juga tengah menggenjot penyesuaian fasilitas di gedung eks Poltekcom yang akan difungsikan sebagai Sekolah Rakyat.

Kepala Dinas PUPR-PKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan secara struktur bangunan Poltekcom sudah siap digunakan, namun tetap dibutuhkan beberapa penyesuaian.

"Bangunan di Poltekcom itu memang sudah siap, tapi karena tidak dirancang sebagai boarding school, perlu beberapa penyesuaian. Khususnya pada fasilitas kamar mandi, agar siswa tidak berebutan. Ini arahnya dari Sekjen Kementerian



Bangunan Poltekcom, bakal lokasi Sekolah Rakyat di Kota Malang. (Santi/Lentera)

PU," ujar Dandung.

Ia memastikan, proses penyesuaian tidak akan melibatkan pembangunan baru, melainkan optimalisasi ruang yang ada. Mulao dari penyesuaian ruang kelas, kamar mandi, dan area asrama. "Pengerjaan mulai bulan ini dan targetnya harus selesai sebelum tahun ajaran baru dimulai," tegasnya. (Santi/Dya)

Viral Atlet Binaraga Makan Ayam Tiren, Pemkab Malang Akui Anggaran Terlambat Cair



Pj Sekda Kabupaten Malang, Nurman Ramdanyah. (Santi/Lentera)

MALANG - Beredar video viral seorang atlet binaraga dari Persatuan Binaraga dan Fitnes Indonesia (PBF) Kabupaten Malang mengonsumsi ayam mati kemarin alias tiren. Dikatakan aksi nekat itu demi memenuhi kebutuhan gizi.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang akhirnya mengakui adanya keterlambatan pencairan anggaran. Padahal saat ini, detik-detik persiapan

para atlet menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2025. Diketahui kegiatan itu akan dilaksanakan pada 28 Juni hingga 5 Juli 2025 di Malang Raya (Kabupatrn dan kota, Red).

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Nurman Ramdanyah, mengakui memang terjadi kendala teknis soal dana untuk Pemasatan Latihan Kabupaten (Puslatkab).

"Ya, anggaran kita memang sedikit terlambat. Semua sebetulnya karena proses pencairan anggaran pemerintah itu tidak bisa langsung seketika. Ada tahapan yang harus dilalui. Tapi Alhamdulillah, kemarin sudah cair semua, termasuk untuk binaraga, sudah bisa kita cukupi," ujar

Nurman, Selasa (6/5/2025).

Terkait kasus atlet binaraga yang terpaksa mengonsumsi ayam tiren sebagai asupan gizi untuk pembentukan otot, Nurman menyebut permasalahan itu telah diselesaikan secara internal dalam pertemuan terbatas dengan para perwakilan cabang olahraga.

Menurutnya, atlet binaraga tersebut mengeluhkan kebutuhan latihannya tidak bisa disamakan dengan cabang olahraga lainnya. Terlebih, performa atlet binaraga sangat ditentukan oleh asupan dan waktu pembentukan otot yang ketat dan berjenjang.

"Sudah kami tuntaskan itu. Karena atletnya agak kecewa, mereka tidak mau disamakan dengan atlet cabor lain. Karena untuk menjaga peak, itu harus dihitung. Dua minggu sampai di mana performanya, tiga minggu, dan seterusnya. Saya minta ketua pengurus cabangnya untuk lebih intensif mengawasi," tegasnya.

Ditambahkannya, peristiwa ini terjadi lebih karena adanya hambatan komunikasi antara pengurus cabang

olahraga dengan atlet. Koordinasi yang kurang lancar disebut menjadi penyebab utama keterlambatan distribusi informasi dan bantuan.

"Kalau saya lihat, ini karena komunikasi yang terhambat antara pengurus cabang dengan atlet. Itu yang harus diperbaiki ke depan," kata Nurman.

Kendati dana telah dicairkan pada Senin (5/5/2025), Nurman mengakui belum seluruh atlet menerima bantuan. Hal ini dikarenakan masih adanya proses aktivasi rekening atlet yang sempat nonaktif atau belum didaftarkan oleh pengurus cabang masing-masing.

"Ada yang masih butuh aktivasi nomor rekening. Tidak semua bisa langsung cair karena memang rekeningnya belum aktif, bahkan ada yang sudah mati. Tapi ini hanya sebagian kecil saja," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Malang, M. Hidayat, mengungkapkan total anggaran yang disiapkan Pemkab Malang untuk mendukung pelaksanaan Porprov Jatim 2025 mencapai Rp19 miliar. (Santi/Dya)

SUDAN CHAOS, DRONE HANCURKAN FASILITAS MILITER DAN BANDARA

Ledakan dan kobaran api dilaporkan terjadi di ibu kota Sudan, Port Sudan, pada Selasa pagi (6/5/2025), menurut keterangan seorang saksi mata. Meski sumber dan lokasi pastinya belum dapat dipastikan, insiden ini terjadi di tengah konflik bersenjata yang telah mengguncang kota yang sebelumnya damai itu selama tiga hari terakhir.

Pada Selasa (6/5/2025), serangan drone menghantam bandara dan menyalak pangkalan militer di Port Sudan. Serangan ini menandai hari ketiga berturut-turut serangan terhadap pihak pemerintah yang berpihak pada militer Sudan.

Dikutip dari AFP, Selasa (6/5/2025), sehari sebelumnya depot bahan bakar utama di negara itu diserang, menyebabkan kebakaran besar di wilayah selatan kota yang sempat dianggap sebagai tempat berlindung yang aman bagi ratusan ribu warga yang mengungsi dari perang selama 2 tahun.

Koresponden AFP melaporkan ledakan ledakan keras disertai gumpalan asap terjadi pada pagi hari di kota pelabuhan itu. Satu datang dari arah pelabuhan, dan satunya lagi dari depot bahan bakar di selatan.

"Satu drone menghantam bagian sipil bandara Port Sudan," kata pejabat bandara kepada AFP, 2 hari setelah pangkalan militer pertama kali diserang dalam serangan drone. Tentara menyebut, serangan itu dilakukan oleh kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF).

Seorang sumber menambahkan, semua penerbangan dibatalkan di pintu utama internasional negara itu. Sementara sumber militer mengatakan drone lainnya

menargetkan pangkalan militer utama di pusat kota, dan saksi mata melaporkan hotel di dekatnya terkena serangan.

Keduanya lokasi itu dekat dengan kediaman Kepala Militer Abdel Fattah al-Burhan, yang berperang dengan mantan wakilnya Mohamed Hamdan Daglo, komandan RSF, sejak April 2023.

Sementara drone ketiga menghantam depot bahan bakar dekat pelabuhan selatan di pusat kota yang padat penduduk. PBB, badan bantuan, dan ratusan ribu warga terlantar yang mengungsi dari Khartoum berada di sana.



Pemandangan menunjukkan gumpalan asap tebal mengepul dari depot bahan bakar di Port Sudan, Sudan, Selasa (6/5/2025). (Reuters)

Saksi mata di utara kota melaporkan tembakan antipesawat dari pangkalan militer.

RSF semakin mengandalkan drone sejak kehilangan wilayah termasuk hampir semua Khartoum pada Maret lalu, menyerang jauh ke dalam wilayah yang dikuasai militer. (AFP, Reuters, ist/nei)

JEJAK KERUSUHAN DI SUDAN

- Des 2018 – Protes besar pecah akibat harga roti dan BBM naik, berkembang jadi gerakan anti-Presiden Omar al-Bashir.
- Apr 2019 – Al-Bashir digulingkan militer, rakyat tuntutan pemerintahan sipil.
- Jun 2019 – Pasukan keamanan serang demonstran di Khartoum, 100+ tewas.
- Agu 2019 – Militer dan sipil bentuk pemerintahan transisi menuju pemilu.
- Okt 2021 – Kudeta militer oleh Jenderal al-Burhan, picu protes besar.
- Apr 2023 – Perang saudara pecah antara SAF dan RSF, rusak infrastruktur, timbul krisis kemanusiaan.
- 2024 – Khartoum, Darfur, dan kota lain jadi medan perang; jutaan mengungsi.
- Mei 2025 – Port Sudan diserang drone, konflik meluas ke wilayah timur.

Kapal Kebaikan Turki Kembali Datang

MULAI dari bantuan makanan hingga membawa secercah harapan, jalur kemanusiaan dari Turki terus menjadi penghubung di tengah perpecahan, mengingatkan bahwa meski krisis memisahkan, kepedulian mampu menyatukan kembali.

Sebuah kapal bantuan kemanusiaan dari Turki yang mengangkut lebih dari 1.600 ton pasokan telah tiba di Pelabuhan, membawa bantuan vital di tengah krisis kemanusiaan yang terus memburuk di negara tersebut.

Kapal tersebut, yang diberi nama "Kapal Kebaikan" kedua, diberangkatkan oleh Yayasan Bantuan Kemanusiaan Turki (IHH) dan mengirimkan 1.605 ton makanan, pakaian, perlengkapan kebersihan, dan bahan tempat tinggal.

Kedatangannya pada hari Senin ditandai dengan penerimaan resmi di pelabuhan, dihadiri oleh Duta Besar Turki untuk Khartoum Fatih Yildiz, Anggota Dewan IHH Mehmet Enes Arikian, Komisaris Bantuan Kemanusiaan Sudan Selva Adem, dan beberapa pejabat setempat.

"Ini merupakan kapal kemanusiaan keempat yang dikirim Turki sejak konflik dimulai," kata Duta Besar Yildiz kepada Anadolu. "Dua kapal dikoordinasikan oleh Otoritas Penanggulangan Bencana dan Darurat Turki (AFAD), sementara ini merupakan kapal kedua dari IHH."

Yildiz menyoroti pentingnya simbolis dan praktis misi tersebut, terutama di tengah laporan peningkatan keamanan di ibu kota Sudan.

"Kedatangan kapal semacam itu meningkatkan moral—tidak hanya bagi kami, tetapi juga bagi rakyat Sudan," katanya. "Pada saat Khartoum sedang dibebaskan, solidaritas kita lebih berarti dari sebelumnya."

Arikian dari IHH menegaskan kembali komitmen jangka panjang organisasinya untuk mendukung rakyat Sudan, dengan mencatat bahwa krisis saat ini telah berlangsung sejak 15 April 2023, ketika bentrokan hebat meletus antara faksi militer yang bertikai.

"Upaya kami terus berlanjut dengan motto, 'Dibimbing oleh

Kebaikan, Menuju Sudan,'" kata Arikian. "Kami bertujuan untuk menjangkau mereka yang paling membutuhkan, mendistribusikan bantuan bekerja sama dengan pemerintah setempat dan mitra kemanusiaan."

Muatan bantuan tersebut diperkirakan akan dikirimkan ke wilayah-wilayah yang terkena dampak konflik di Sudan dalam beberapa hari mendatang, membawa bantuan yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang berjuang melawan pengungsian, kerawanan pangan, dan memburuknya akses terhadap layanan dasar. (TRTGlobal, ist/nei)

Diabetes Tipe 5 Diakui, Dunia Medis Revisi Klasifikasi

Pada April 2025, International Diabetes Federation (IDF) secara resmi mengakui diabetes tipe 5 sebagai bentuk baru diabetes yang terkait dengan kondisi malnutrisi kronis.

Dikutip dari situs resmi IDF, Diabetes tipe 5 umumnya menyerang remaja dan dewasa muda dengan tubuh kurus dan mengalami kekurangan gizi, khususnya di wilayah Asia dan Afrika. Pengakuan ini diumumkan dalam World Diabetes Congress IDF di Bangkok, Thailand, dan menjadi tonggak penting dalam memperluas pemahaman global mengenai ragam penyakit diabetes.

Dengan pengakuan ini, muncul kebutuhan untuk menjelaskan kembali berbagai tipe diabetes yang ada. Diabetes bukanlah satu kondisi tunggal, melainkan kumpulan penyakit metabolik dengan penyebab dan mekanisme yang berbeda-beda.

Berdasarkan mekanisme penyakit, diabetes dapat dikelompokkan. Diabetes dapat dikelompokkan berdasarkan mekanisme biologis yang menyebabkannya, seperti kerusakan sel pankreas oleh sistem imun, resistensi insulin, atau gangguan akibat kondisi tertentu. Kategori ini mencakup tipe yang paling dikenal luas.

Diabetes Tipe 1

Diabetes tipe 1 terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel beta di pankreas, sehingga tubuh tidak lagi memproduksi insulin. Menurut Diabetes UK, umumnya terjadi pada anak-anak atau remaja, namun bisa juga pada dewasa. Pengobatannya memerlukan insulin seumur hidup.

Diabetes Tipe 2

Tipe 2 adalah bentuk paling umum dan terjadi ketika tubuh tidak merespons insulin dengan baik atau produksi insulin tidak mencukupi. Umumnya dikaitkan dengan obesitas dan gaya hidup tidak sehat. Pengelolannya melibatkan diet, olahraga, obat oral, dan kadang insulin.

Diabetes Tipe 3c

Disebut juga pancreatogenic diabetes, tipe ini muncul akibat kerusakan

fisik pada pankreas, seperti akibat pankreatitis, kanker pankreas, atau operasi pengangkatan pankreas. Fokus pengobatannya adalah mengelola kadar gula darah sekaligus kondisi penyebab utamanya.

Diabetes tipe 4

Diabetes tipe 4 bukanlah kondisi autoimun seperti diabetes tipe 1 dan tidak terkait dengan berat badan seperti diabetes tipe 2. Sebaliknya, diabetes tipe 4 ini mungkin terkait dengan proses penuaan.

Diabetes tipe 4 adalah istilah yang diusulkan untuk diabetes yang disebabkan oleh resistensi insulin pada orang tua yang tidak mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Sebuah studi tahun 2015 dengan tikus menunjukkan bahwa tipe diabetes ini mungkin kurang terdiagnosis. Hal ini karena diabetes tipe 4 disebut bisa terjadi pada orang yang tidak mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, tetapi sudah berusia lanjut.

Diabetes Tipe 5

Diabetes tipe 5 atau malnutrition-related diabetes terjadi akibat gangguan perkembangan pankreas karena kekurangan gizi jangka panjang, terutama di masa anak-anak. Penderitanya biasanya kekurangan insulin, tapi tidak mengalami resistensi insulin, sehingga dapat diobati dengan obat oral. Tak hanya itu, tipe 5 juga dapat disebabkan faktor genetik.

Berdasarkan Faktor Genetik (Monogenik)

Beberapa jenis diabetes disebabkan oleh mutasi pada satu gen tertentu

dan diturunkan dalam keluarga. Penyakit ini umumnya dapat terdeteksi di usia muda dan sering salah terdiagnosis sebagai tipe 1 atau 2.

MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young)

MODY disebabkan oleh mutasi gen tunggal dan biasanya diturunkan secara dominan dalam keluarga. Muncul pada usia muda, sering kali sebelum usia 25 tahun, dan tidak terkait dengan obesitas atau gaya hidup. MODY dapat diobati dengan obat oral, bukan insulin.

Neonatal Diabetes

Muncul pada bayi di bawah usia 6 bulan dan bukan karena autoimun. Sama seperti MODY, neonatal diabetes juga merupakan bentuk diabetes monogenik, meski sangat langka.

Diabetes Sekunder atau Akibat Kondisi Lain

Ada beberapa bentuk diabetes yang berkembang akibat kondisi lain atau situasi tertentu, seperti kehamilan atau penggunaan obat-obatan.

Diabetes Gestasional

Menurut WebMD, tipe ini terjadi selama kehamilan akibat perubahan hormon yang menyebabkan resistensi insulin. Umumnya hilang setelah melahirkan, tapi meningkatkan risiko ibu mengalami diabetes tipe 2 setelah

melahirkan.

LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults)

LADA adalah bentuk diabetes autoimun yang berkembang lambat pada orang dewasa. Sering disalahartikan sebagai tipe 2 karena awalnya tidak memerlukan insulin, namun pada akhirnya membutuhkan terapi insulin seperti tipe 1.

Steroid-Induced Diabetes

Beberapa obat seperti steroid dapat memicu peningkatan kadar gula darah, terutama pada individu dengan risiko diabetes. Ini disebut diabetes yang diinduksi obat.

Cystic Fibrosis-Related Diabetes

Penderita fibrosis kistik dapat mengembangkan diabetes karena kerusakan pankreas akibat penyakit tersebut.

Dengan pengakuan terhadap diabetes tipe 5, dunia medis kini semakin menyadari pentingnya pendekatan yang dipersonalisasi dalam menangani berbagai bentuk diabetes. Setiap tipe memiliki penyebab, gejala, dan pendekatan pengobatan yang berbeda.

Ancaman Tersembunyi bagi Remaja

Para remaja, terutama mereka yang hidup di negara berkembang, berisiko mengalami Diabetes Tipe 5 akibat kekurangan gizi yang serius. (nei,ist/dya)



Prestasi Mahasiswa Surabaya di Singapura: Hanya Butuh 6 Jam Rancang 1 Jembatan



Tim Civil @PCU berhasil memenangkan silver award dalam International Bridge Design Competition (BDC) 2025. (Istimewa)

Tim mahasiswa Teknik Sipil dari Petra Christian University (PCU) sukses menyabet Silver Award dalam ajang International Bridge Design Competition (BDC) 2025 yang digelar di Nanyang Technological University (NTU), Singapura, pada level kompetisi internasional.

Kompetisi ini merupakan sebuah kompetisi bergengsi yang berfokus pada inovasi dan keunggulan dalam desain struktur jembatan yang menguji kemampuan para mahasiswa teknik sipil. Setiap tim diminta membuat jembatan dari kayu balsa dan kayu bass berdasarkan studi kasus Sungai Manggis Quirk.

Tim yang bernama Civil @PCU ini

terdiri dari Cornelius Jefferson Tjahjono, Timothy Christian Sayogo, dan Winston Tankoma berhasil mengungguli 172 tim dari universitas terkemuka dunia yang datang dari berbagai negara. Antara lain dari Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Filipina.

Ditanya mengenai perasaannya saat diumumkan menjadi juara, Winston mewakili timnya menjawab, "Sangat senang dan tidak menduga". Mengingat, tim yang dipertemukan saat kampus itu harus bersaing dengan universitas-universitas kelas dunia. Meski begitu, mereka percaya bahwa usaha dalam memberi yang terbaik akan berbalas hasil yang baik pula.

Berbagai kesulitan telah dialami

sejak awal. Salah satunya, studi kasus yang baru diumumkan saat hari H lomba. Dalam waktu enam jam saja, ketiga mahasiswa angkatan 2021 ini harus merancang jembatan, membuat video presentasi, hingga memaparkan solusi teknis dalam bahasa Inggris pada dewan juri dari perusahaan-perusahaan engineering ternama.

Berkat ketelatenan dan perhitungan yang rumit, "Basic Legendary Truss Bridge" akhirnya telah berhasil dirancang dalam kompetisi yang dilakukan di universitas terbesar di Singapura itu. Mereka menggabungkan tipe rangka batang Howe dan Pratt dalam membuatnya sehingga mampu menahan gaya dalam, baik tekan

maupun tarik.

"Kami ingin menampilkan desain yang sederhana, tapi efektif dan kuat," jelas Timothy. Terbukti saat penjurian, jembatan yang ringan dan ekonomis tersebut mampu menahan beban sebesar 224.51 Newton atau sekitar 22.9 kilogram dengan berat jembatan hanya 14.94 gram saja.

Penilaian meliputi banyak hal mulai dari penggunaan bahan (aspek ekonomi), estetika hingga load testing (pengujian pembebanan). Kesemuanya memiliki bobot hingga 80 persen.

Kemenangan tak terbentuk secara instan, persiapan sudah dilakukan jauh-jauh hari. Cornelius dan Winston berdiskusi terlebih dahulu

dengan Ruben Adicahya, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing mengenai desain dasar jembatan yang akan digunakan.

"Kami juga membagi job description dan latihan agar saat lomba dapat saling melengkapi," tambah Cornelius.

Hasilnya, mereka dapat mencuri perhatian sebagai "kuda hitam" di antara tim-tim berpengalaman di sana. Lewat pencapaian ini, tiga mahasiswa yang baru pertama kali mengikuti perlombaan internasional di bangku perkuliahan tersebut berharap kisah mereka bisa menginspirasi angkatan-angkatan muda untuk berprestasi. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Rambut Lepek? Ini Penyebabnya dan Cara Mengatasinya!

Rambut lepek setiap hari pasti pernah jadi masalah yang bikin kesal, apalagi saat kamu merasa sudah merawatnya dengan baik. Tapi tenang, kamu berada di tempat yang tepat! Dalam artikel ini akan dibahas berbagai penyebab rambut lepek serta tips mudah yang bisa kamu coba untuk mengatasinya.

Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan rambut lepek? Secara sederhana, rambut lepek adalah kondisi di mana rambut terlihat lemas, tidak mengembang, dan tampak kusam. Berbeda dengan rambut sehat yang biasanya tampak tebal, bervolume, dan penuh vitalitas—ciri yang banyak diidamkan. Sayangnya, orang dengan jenis rambut tipis cenderung mengalami rambut yang mudah lepek, sehingga terlihat kurang menarik dan bisa mengganggu penampilan.

Memiliki rambut lepek bisa membuat frustrasi karena rambut terlihat tidak menarik sama sekali. Meskipun tidak banyak yang dapat dilakukan untuk mengubah tekstur rambut lepek yang dimiliki, kabar baiknya adalah, kamu dapat menciptakan ilusi rambut indah dengan beberapa kiat dan trik yang akan segera dijelaskan di bawah ini. Melansir dari lovedbycurls.com, berikut ini adalah penyebab dan cara mudah untuk mengatasi rambut

lepek.

Apa Penyebab Rambut Lepek?

Memiliki Rambut Halus Secara Alami Ini adalah alasan paling umum di balik rambut lepek yang dimiliki. Bila rambut sangat halus, artinya setiap helainya tipis dan berdiameter sangat kecil. Ini tidak berarti kamu tidak memiliki rambut yang lebat atau rambut menipis. Faktanya, orang dengan rambut halus cenderung memiliki lebih banyak folikel rambut daripada orang dengan rambut bertekstur tebal. Karena rambut tipis, kulit kepala kamu memiliki ruang untuk lebih tumbuh banyak helai rambut.

Satu-satunya masalahnya adalah banyaknya folikel rambut menyebabkan lingkungan kulit kepala menjadi terlalu berminyak, sehingga r a m b u t kehilangan

bentuk dan pantulan yang seharusnya dimilikinya. Setiap helai rambut melekat pada kelenjar minyak, sehingga produksi minyak yang berlebihan pada akhirnya akan membebani rambut, sehingga rambut tampak lepek dan lemas. Orang dengan rambut tipis juga memiliki rambut lepek karena kulit kepala tidak memiliki cukup helai rambut untuk menciptakan tampilan bervolume.

Menggunakan Produk Rambut yang Salah

Meskipun memiliki rambut lepek terdengar alami, tetap sebenarnya kita dapat memiliki rambut lepek meskipun tidak secara genetik memiliki kecenderungan memiliki rambut halus. Jika tekstur rambut tidak tergolong halus, kemungkinan rambut lepek disebabkan oleh penggunaan produk rambut yang tidak tepat.

Misalnya, jika kita menggunakan produk rambut secara berlebihan dan tidak cukup mencuci atau membilas rambut, rambut akan menjadi berminyak karena terbebani oleh residu yang ditinggalkan setelah penggunaan produk perawatan rambut. Selain itu, penggunaan produk yang tidak cocok dengan tekstur rambut yang dimiliki dapat membuat rambut lepek.

Teknik Penataan Gaya Rambut yang Buruk

Menata rambut dengan alat styling yang panas juga dapat membuat rambut lepek. Ketika menggunakannya terlalu dekat ke akar rambut dapat membuat rambut terlihat lepek tampak tak bernyawa.

Ini biasanya terjadi saat menggunakan pelurus rambut untuk menambah panjangnya.

Kadang-kadang kamu mungkin berlebihan menggunakan alat catok rambut saat mencoba mengatasi rambut kusut dipagi hari. Di waktu lain, rambut lepek juga bisa disebabkan oleh pemilihan gaya rambut yang salah,

rambut yang terlalu panjang, atau rambut yang tidak dilapisi dengan benar.

Cara Memperbaiki Rambut Lepek

Gunakan Produk Rambut dengan Benar

Tahukah kamu, bahwa meskipun sudah menggunakan produk yang tepat untuk tekstur rambut yang kamu miliki, rambut akan tampak lepek jika masih mengaplikasikan kondisioner pada akar rambut. Idealnya, kondisioner rambut sebaiknya diaplikasikan mulai dari bagian tengah batang rambut hingga ke ujung rambut saja.

Jangan khawatir tentang akar rambut, karena akar rambut dikondisikan oleh minyak alami yang diproduksi oleh kelenjar di kulit kepala. Menggunakan kondisioner atau serum rambut pada akar rambut hanya akan memberatkan helaian rambut dan membuatnya tampak tak bernyawa.

Gunakan Teknik Layering untuk Rambut Lebih Bervolume

Rambut halus akan terlihat lebih bervolume dengan potongan berlapis. Gaya ini membantu menciptakan ilusi rambut lebih tebal dan memberikan gerakan alami yang indah dan menawan.

Saat memotong rambut, mintalah penata rambut untuk menambahkan beberapa lapisan, terutama pada rambut berombak, agar tampak lebih dinamis dan mudah bergerak.

Cuci Rambut Secara Teratur dan Bilas Sampai Bersih

Jika rambut lepek yang kamu miliki disebabkan oleh penumpukan residu dan kotoran, detoksifikasi rambut dapat membantu membuatnya kembali tampak hidup dan bervolume.

Gunakan sampo dan kondisioner detoks untuk membersihkan rambut dan kulit kepala serta menghilangkan kotoran, debu, dan minyak yang menumpuk.

Ini dapat mengembalikan elastisitas dan kilau rambut, membuat rambut akan tampak lebih hidup. Pastikan untuk membilas sampo hingga bersih, ya. Jika tidak, sisa sampo akan membuat rambut terasa berat dan tidak nyaman. (nei,ist/dya)

Keracunan Berlanjut, (dari Hal 1)

Program makan bergizi gratis (MBG) telah menasar 3,5 juta penerima manfaat hingga 6 Mei 2025. Selain itu, total Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mencapai 1.286 dapur dan membuka lapangan kerja sebanyak 48.452 orang.

Namun begitu, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda menilai kontribusi MBG tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian tanah air.

"Seperti yang sudah kita lakukan, dampaknya hanya sebesar 0,06 % saja kepada perekonomian," kata Nailul, Selasa (6/5/2025).

Nailu melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025, adanya program MBG tidak membantu banyak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sektor penyediaan makan dan minum, tumbuh melambat pada kuartal I-2025, dengan pertumbuhan sebesar 7,12 %. Sedangkan pada kuartal I-2024 tanpa ada program MBG, pertumbuhan sektor penyediaan makan dan minum mampu tumbuh sebesar 9,57%.

Untuk itu, menurutnya perlu evaluasi secara komprehensif untuk program MBG mulai dari BGN di pusat hingga SPPG di daerah.

"Mulai dari penyediaan makanan hingga proses pembayaran masih bermasalah hingga sekarang," jelas Nailul.

Nailul juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan bahwa 99% program MBG sukses, karena yang terjadi keracunan makanan basi hanya segelintir.

Nailul menyanggah pernyataan Presiden, padahal makanan yang basi, keracunan, dan lainnya berpotensi menurunkan gizi bagi anak-anak.

"Kedua, mereka bisa trauma mengikuti program MBG. Bukan hanya angka, tapi ini soal bagaimana pemerintah responsif terhadap program MBG," jelas Nailul.

Senada, Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Iskandar mengatakan kasus keracunan yang terjadi seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan program MBG. Bukan justru melihat kecilnya angka ketimbang total penerima program.

Menurutnya, kasus keracunan yang terjadi seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan program MBG. Bukan justru melihat kecilnya angka ketimbang total penerima program. "Sudah terjadi berulang sejak Januari. Jumlahnya signifikan. Jadi bukan hanya ratusan, bahkan bisa lebih kalau disisir secara menyeluruh. Pemerintah sebaiknya

mengakui dan memperbaiki, bukan buru-buru mengklaim sukses," ujarnya.

Keberhasilan MBG harusnya dilihat dari sejauh mana program ini tepat sasaran, apakah pelaksanaannya berjalan baik, serta dampaknya terhadap anak-anak penerima, terutama gizi dan motivasi belajar.

"Keracunan itu bukan hanya soal makanan basi. Ini menyangkut nyawa manusia. Satu nyawa saja tidak bisa dinilai dengan angka statistik. Tidak bisa dibalang hanya sebagian kecil dari keseluruhan," kata Media.

"Sangat ironis karena ucapan itu keluar dari Presiden. Idealnya, Presiden menjelaskan sesuatu berdasarkan data empiris dan mengevaluasi kebijakan dengan indikator yang benar," sambungnya.

Pemprov Sumatra Selatan hingga saat ini masih menyelidiki kasus keracunan massal yang dialami ratusan siswa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sumsel Dedy Irawan mengatakan jumlah siswa yang keracunan terus bertambah, kini 174 siswa.

Sementara delapan siswa masih menjalani perawatan di RSUD Talang Ubi PALI. Penambahan jumlah siswa yang keracunan itu terjadi tadi malam, dan pihak keluarga mengantar para siswa yang

mengalami gejala mual, muntah, dan pusing.

"Saat ini sedang dalam perawatan sebanyak delapan orang dan kondisinya sudah stabil, tinggal pemulihan saja. Sedangkan 166 siswa lainnya sudah diperbolehkan pulang," katanya, Selasa (6/5/2025).

Keracunan terjadi setelah ratusan siswa tersebut mengonsumsi makanan dari Program MBG sekitar pukul 11.00 WIB hingga 12.00 WIB siang, Senin (5/5/2025), dan semuanya dirawat di RSUD Talang Ubi dan Puskesmas PALI.

Sebanyak 121 siswa yang mengalami keracunan makanan dari program MBG itu meliputi siswa PAUD, SD, SMP hingga SMA.

Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengubah mekanisme pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan perubahan itu, kini pembayaran MBG tak lagi menggunakan sistem reimburse.

Ia menyebut dengan skema baru ini, seluruh kegiatan program wajib didanai terlebih dahulu melalui model uang muka yang dikirim ke rekening virtual account. Hal ini sebagai bentuk pembenahan menyeluruh setelah munculnya sejumlah persoalan di lapangan, termasuk kasus mitra dapur di Kalibata.

Dadan menegaskan MBG merupakan program bantuan pemerintah dalam bentuk pembiayaan sosial, yang sejak awal

tidak dipercayakan kepada individu maupun kelompok masyarakat, melainkan kepada yayasan berbadan hukum.

Skema ini bertujuan untuk meminimalisasi risiko dan menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran.

Dirinya menjelaskan sebelumnya dana bantuan disalurkan ke rekening yayasan dan dapat langsung digunakan. Namun, BGN kemudian mengubah mekanisme itu menjadi lebih ketat, dengan pengawasan dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan kini diperkuat lagi dengan penggunaan sistem virtual account.

"Virtual account adalah rekening bersama yang dibuat oleh Badan Gizi ketika mitra sudah terverifikasi. Rekening ini hanya bisa dicairkan oleh dua pihak, perwakilan yayasan dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi," ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Ia menjelaskan sistem ini dirancang agar semua transaksi tercatat secara digital dan transparan. Bahkan, menurut Dadan, Kementerian Keuangan pun bisa memantau seluruh transaksi yang terjadi di virtual account masing-masing SPPG.

Kini, tidak ada satu pun kegiatan MBG yang boleh berjalan tanpa virtual account dan dana operasional untuk 10 hari ke depan telah masuk ke dalamnya. (wid,din,ktn,rls,ist/dya)

Pagu Indikatif MBG 2026 Jadi Rp268 T, Naik 57%

KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) memaparkan pagu indikatif dari Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal meningkat menjadi Rp268 triliun pada 2026. Angka itu meningkat 57% secara tahunan (year-on-year/yoy) bila dibandingkan dengan rencana pagu Rp171 triliun pada 2025.

Informasi peningkatan pagu indikatif itu diketahui melalui paparan Direktur Penyusunan APBN Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rofyanto Kurniawan dalam agenda Rakorbangpus 2025 dan Kick Off Meeting Penyusunan RKP 2026 secara virtual pada Senin (5/5/2025).

Sekadar catatan, pagu indikatif adalah rencana anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja kementerian/lembaga.

Dalam paparannya, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan target penerima tidak mengalami perubahan, yakni tetap 32.000 dan 82,9 juta pada 2026. Pagu Rp268 triliun pada 2026 itu memberikan kontribusi 1,03%

terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2026, meningkat dari 0,82% pada 2025.

Selain itu, tenaga kerja yang terlibat adalah 1,32 juta orang pada 2026, meningkat dibandingkan dengan 1,03 juta orang pada 2025. Selain itu, penurunan kemiskinan adalah 0,38 poin persentase pada 2026, meningkat dibandingkan dengan 0,27 poin persentase pada 2025.

"Anggaran awal Rp 71 triliun, ini akan terus meningkat. Sehingga diharapkan di akhir 2025, coverage mencapai 82,9 juta pelajar, ibu hamil menyusui dan balita. Kita harapkan, kalau target 82,9 juta tercapai, tentunya kita harapkan untuk meningkatkan kualitasnya," ujar Rofyanto dalam agenda Rakorbangpus 2025 dan Kick Off Meeting Penyusunan RKP 2026 secara virtual pada Senin (5/5/2025).

Dikonfirmasi, Rofyanto mengatakan untuk mencapai target peserta 82,9 juta pelajar, ibu hamil, dan balita, exercise anggarannya adalah Rp268 triliun. "Untuk anggarannya masih terus diexercise

untuk nantinya diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat," ujar Rofyanto

Terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengamini pagu indikatif dari MBG bakal meningkat menjadi Rp268 triliun pada 2026.

"Pagu indikatif [Rp268 triliun pada 2026]. [Penerima] tetap 82,9 juta, [pagu meningkat karena] mulainya dari Januari dengan populasi besar," ujar Dadan.

Sementara dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, mengungkapkan lembaganya masih membutuhkan anggaran hingga Rp116 triliun pada Desember 2025.

"Kami memiliki target bulan Juni sudah Rp4,71 triliun yang kami serap, kemudian akan melonjak pada bulan Juli mencapai Rp16 triliun. Agustus sudah Rp28 triliun, September kita akan menyerap kurang lebih Rp51 triliun, kemudian Oktober Rp60 triliun, November Rp88 triliun, dan Desember Rp116 triliun," tutur Dadan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025). (wid,rls,ant,blo,ist/dya)



DPRD Surabaya Soroti Masih Sulitnya Warga Urus Sertifikasi Tanah

Laila Mufidah: Pemkot Harus Hadir, Inisiasi Gandeng BPN



(Ilustrasi) Pemkot Surabaya didorong memfasilitasi warga dalam pengurusan sertifikat tanah. (ist)

KELUH kesah warga Kota Pahlawan soal sulitnya pengurusan sertifikasi tanah mendapat perhatian dari DPRD Surabaya. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Laila Mufidah mendorong agar ada program khusus dari Pemerintah Kota (Pemkot) sebagai solusi masalah tersebut. Ditegaskannya, sertifikasi tanah di Surabaya saat ini perlu dilakukan akselerasi.

"Pemkot harus hadir memfasilitasi problematika sertifikasi tanah warganya. Jalin kerja sama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) agar warga bisa mendapat layanan mudah," kata Laila Mufidah, Selasa (6/5/2025).

Dikatakannya, banyak warga Surabaya yang mengimpikan agar tanah yang tempat bersertifikat hak milik (SHM). Diharapkan, tanah waris hingga tanah jual beli yang sah bisa lebih cepat pengurusan sertifikatnya.

Namun nyatanya, warga mengeluhkan mengurus sertifikat tanah di Kota Surabaya sulit dan rumit. Bahkan disebut berbiaya mahal dan prosesnya lama.

"Untuk itu perlu intervensi dan sentuhan Pemkot Surabaya untuk menyelesaikan masalah klasik ini," tegas Laila.

Politisi perempuan PKB ini mendesak agar ada percepatan dan akselerasi dalam mengurus sertifikat tanah melalui program Pemkot. Bisa diinisiasi melalui program kerja sama dengan BPN.

Dia mencontohkan seperti saat Pemkot menggandeng Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk program Lontong Balap (Layanan Online Terpadu One Gate System bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengadilan Negeri). Laila mengimpikan program seperti

'Lontong Balap' tetapi terkaot sertifikat melalui kolaborasi dengan BPN.

Warga Surabaya saat ini menurut Laila jengah dan putus asa saat mengurus sertifikat tanah. Banyak warga yang akhirnya putus asa, padahal menempati tanah-tanah sendiri dengan dokumen yang sah.

Mulai dari Petok D, hasil akta jual beli, serta riwayat tanah yang sah. Semua administrasi lengkap, namun saat memproses pengajuan sertifikat, tetap saja sulit. Warga juga takut akan biaya tinggi yang muncul saat pengurusan.

Menyoal Sertifikasi Online

Diketahui saat ini sebenarnya ada program pengurusan sertifikasi tanah dengan sistem digital milik BPN. Tapi

nyatanya warga juga masih sangat kesulitan mengakses layanan tersebut.

Laila mempertanyakan program layanan online, tapi belum bisa memberi percepatan layanan pada masyarakat. "Warga bingung," kata Laila.

Saat turun ke masyarakat, Laila menjadi tahu sendiri bila warga sangat kesulitan mengurus sertifikat tanah di daerahnya.

Di Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo misalnya, warga mengeluhkan tidak mudahnya mengurus sertifikat tanah milik mereka sendiri. Tidak hanya tanah di kampung, tapi juga tanah kavling.

Ada sejumlah warga yang sudah bisa mengakses, tapi mereka terkendala hingga memilih melaporkan ke kelurahan. Sayangnya kelurahan juga angkat tangan, karena pihak kelurahan mengaku tidak tahu menahu.

"Ada warga yang menyebut pihak kelurahan meminta warga mengurus sendiri. Tidak perlu melibatkan kelurahan. Alasannya diklaim mudah. Nyatanya warga kesulitan," ucap Laila.

Perempuan asli Kutisari ini mendesak agar otoritas pertanahan melakukan sosialisasi dengan baik kepada warga. Pimpinan DPRD ini mendukung penuh jika Pemkot Surabaya menginisiasi kolaborasi dengan BPN dengan program

sertifikasi massal yang dikoordinir kelurahan.

"Sebaiknya jangan berjalan sendiri atas nama institusi BPN tapi gandeng Pemkot melalui kecamatan atau kelurahan," tegasnya.

Dia juga meminta, RT dan RW dilibatkan untuk menawarkan layanan sertifikasi tanah yang memudahkan. "Bukan bikin rumit dan membuat warga takut. Takut warga akan dikenakan biaya tinggi saat mengurus sertifikat tanah," ujarnya.

Ditegaskan, dokumen sertifikat tanah merupakan dokumen penting yang tidak hanya menyangkut hak kepemilikan legal, tetapi juga menjadi jaminan masa depan bagi keluarga.

"Jangan sampai persoalan sertifikasi ini dibiarkan berlarut-larut. Pemkot dan pemerintah pusat melalui BPN harus hadir memberikan solusi untuk mempermudah warga memperoleh hak sertifikat tanah miliknya sendiri. Kecuali tanah sengketa dan riwayat tidak jelas," tegasnya. (adv,ama/dya)



Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah

Usulkan Sertifikasi Massal

WAKIL Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah mengusulkan agar Kota Surabaya kembali menggelar program sertifikasi massal. Dengan cara menggandeng BPN, pengajuan bisa dilakukan dari jenjang kelurahan.

Memang sedikit membuat repot kelurahan, karena harus mendapat tugas baru mengurus layanan sertifikat tanah. Namun Pemkot bisa mengatur jadwal layanan dan penempatan tenaga yang memadai.

Agar tidak membludak juga bisa memberi persyaratan khusus. Setiap warga yang memenuhi kualifikasi bisa mendapat kuota. "Termasuk warga gakin (keluarga miskin) harus prioritas dalam mengurus sertifikat tanah," kata Laila.

Namun Laila mengingatkan kepada warga juga mematuhi semua persyaratan. Jika memang tidak layak karena dokumen belum lengkap harus dilengkapi dan sah. Menurutnya, Pemkot bisa membantu untuk menekan biaya melalui sertifikasi massal.

Diketahui, sertifikasi massal sebenarnya pernah digelar di Surabaya. Dikatakannya, sudah sekitar enam atau tujuh tahun lalu. Entah kenapa program promasyarakat itu dihentikan. Senada, Ketua RT 02 Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, mendesak Pemkot memfasilitasi sertifikasi massal.

"Sudah lama dan mahal kalau urus perorangan begini. Biasanya

malah banyak calo. Ada yang sampai bayar Rp 30 juta untuk urus sertifikat tanah," kata Riono.

Warganya tidak memperlmasalahkan jika memang ada biaya. Tapi jangan sampai jutaan. Namun dia lebih senang jika Pemkot dan kelurahan menggelar sertifikasi massal, karena akan lebih mudah. (adv,ama/dya)